

# **Pemikiran Kritis Tentang Multikulturalisme Menuju Pendidikan Multikultural**

**Rafiudin**

Program Studi Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah  
Jalan H. Enggus Arja No. 1 Link. Citangkil Cilegon 42443  
Email: averus.rafi@gmail.com

## ***Abstrak***

*Multikulturalisme belumlah menjadi sebuah konsep yang ideal terlebih lagi jika disandingkan dengan pendidikan, utamanya dalam menentukan haluan bersama yaitu hidup bahagia dengan penuh nilai-nilai keluhuran budi di dunia pendidikan, karena di dalamnya ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Masih adanya bias gender dalam konsep multikulturalisme adalah sisi lain dalam mengungkap fenomena perkembangan sebuah konsep yang lahir dalam komunitas majemuk seperti bangsa Indonesia. Bias dapat diatasi dengan mengungkap keluhuran suatu budaya berupa nilai-nilai kemanusiaan dan kesusilaan di mana suatu budaya tidak dapat mengekspresikan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Pendidikan multikultural pada akhirnya tetap menjadi sebuah alat yang dapat dijadikan landasan untuk melahirkan sesuatu yang baik di tengah-tengah masyarakat majemuk dan kompleks. Ruang lingkup yang ada dalam konsep multikulturalisme dapat dibenahi menuju konsep pendidikan multikultural sebagai salah satu usaha menuju pendidikan yang lebih baik di bumi Indonesia.*

***Kata Kunci:*** Multikulturalisme, Pendidikan Multikultural

## **Pendahuluan**

Bangsa yang besar seperti Indonesia dengan berbagai keragaman yang dimiliki adalah sebuah anugerah terbesar bangsa ini yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Keragaman bahasa, keyakinan, dan budaya menjadi nilai tersendiri bagi bangsa yang patut untuk dijaga dan rawat serta dikembangkan agar memiliki nilai guna yang lebih baik untuk kepentingan bangsa dan negara.

Dari berbagai keragaman yang ada tersebut, tampaknya keragaman budaya atau yang lebih dikenal dengan multikulturalisme menjadi sebuah perbincangan hangat di kalangan akademisi sehingga membutuhkan respon positif agar berdampak positif dalam mengurai sebuah makna simbolis yang tersirat dalam sebuah kata yang sangat populer tersebut. Para akademisi berusaha menyikapi dan menggali serta mengolah kata tersebut agar lebih mengena pada sasaran yang sesungguhnya diharapkan kebaikannya. Menurut Rex (1985) dan Fay (1996) dalam (Suparlan, 2002), multikulturalisme lahir dari benih-benih konsep yang sama dengan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip etika dan moral egaliter sosial-politik.

Selanjutnya menurut Dody S Truna (2010:67) konsep multikulturalisme utamanya di Indonesia memiliki kesamaan dengan pluralisme yang lebih dulu dikenal yaitu membicarakan sebuah substansi yang berkaitan dengan pengakuan, kesetaraan, keadilan, toleransi, perlakuan yang sama. Namun rumusnya dinilai belum terlalu tegas. Bahkan Ainul Yaqin (Truna, 2010:72) lebih luas lagi mengungkapkan bahwa multikulturalisme bisa menjangkau bidang yang sangat luas termasuk bahasa, difabilitas, ras dan etnik, gender, orientasi seksual, dan sebagainya.

Kompleksnya masalah yang dijangkau oleh multikulturalisme membuat sebuah wacana yang besar tentang suatu objek kajian. Membahas multikulturalisme berarti membahas tentang demokrasi, HAM, pluralisme bahkan pada orientasi seksual termasuk di dalamnya. Memandang hal tersebut perlu dibukanya ruang yang lebih kondusif dalam mengkaji multikulturalisme sehingga dapat dibentuk sebuah alur yang tepat dalam menangani kompleksitas masalah yang ada, berupa konsep yang lebih relevan dalam perkembangan umat manusia.

Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat

majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Arah kesetaraan derajat manusia di hadapan manusia lain adalah menjadi sebuah titik konsep yang patut untuk diulas bersama. Kajian mengenai multikulturalisme mau tidak mau akan mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakkan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas (Suparlan, 2002). Di dalamnya ada semangat kebangsaan yang harus terus dipupuk sehingga menjadi haluan bersama dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan sejahtera.

Multikulturalisme menjadi jembatan pemersatu sebuah bangsa yang besar seperti Indonesia dan menjadi benteng pertahanan yang kokoh dalam menghadapi ekses budaya lain yang baru datang dan mencoba menggerus budaya luhur bangsa Indonesia. Budaya-budaya yang lahir di bumi pertiwi ini adalah budaya yang mengedepankan jalinan silaturahmi dengan berpedoman kepada keluhuran budi yang agung sehingga menjadi sentral kebijakan bagi bagi bangsa dalam memfilter sebuah budaya baru yang datang menghampiri.

Pengakuan akan kesamaan derajat dari fenomena budaya yang beragam itu tampak dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, yang diterjemahkan dengan berbeda-beda tetapi tetap satu. Ungkapan itu sendiri mengisyaratkan suatu kemauan yang kuat untuk mengakui perbedaan tapi sekaligus memelihara kesatuan atas dasar pemeliharaan keragaman, bukan dengan menghapuskannya atau mengingkarinya. Perbedaan dihargai dan dipahami sebagai realitas kehidupan, hal ini adalah asumsi dasar yang juga melandasi paham multikulturalisme.

Menurut Din Syamsudin (2016), budaya multikulturalisme itu berdimensi ganda, bisa mendorong integrasi dan sekaligus disintegrasi, sehingga membangun persatuan melalui multikulturalisme harus menempuh beberapa hal, yaitu: *Pertama*, harus ada kesadaran tentang pentingnya multikulturalisme, yang dalam pandangan Islam adalah hukum (ketetapan) Tuhan dan *Kedua*, mengembangkan budaya dalam masyarakat untuk saling menghargai dan tenggang rasa.

Meskipun demikian bukan berarti multikulturalisme sendiri tidak memiliki problem. Adanya keragaman budaya yang terdapat di sebuah bangsa yang besar sudah tentu melahirkan sebuah problem sehingga bangsa ini perlu mencari solusinya ditambah lagi

dengan adanya budaya baru yang datang menerpa silih berganti dari satu bangsa dengan bangsa yang lainnya tentu lebih banyak lagi melahirkan problem-problem. Persinggungan budaya pasti terjadi, tapi haluan yang utama menjadikan persinggungan tersebut menjadi sebuah kekuatan yang justru dapat memperkaya bangsa ini dalam memahami setiap unsur budaya dari bangsa manapun, bahkan bangsa yang besar adalah bangsa yang sejatinya mampu mengelaborasi setiap budaya yang datang dari bangsa lain dalam konteks pemanfaatan ke arah haluan bersama yaitu menjadi sebuah bangsa yang arif dan bijaksana dalam menyikapi budaya bangsa lain.

Dinamika hidup berbangsa yang sedang dijalani oleh bangsa Indonesia perlu memunculkan sebuah sistem pertahanan agar keragaman budaya di dalam negeri dapat dijadikan sebuah kekuatan bukan pelemah persatuan dan budaya yang datang dari luar menjadi sebuah tantangan mencapai kemajuan bukan sebuah ancaman yang melahirkan kehancuran. Dengan demikian perlu kiranya dibuat sebuah telaah mendalam tentang multikulturalisme yang melibatkan pemikiran yang baik serta progresif agar mencapai tujuan yang diinginkan, selain tepat juga cepat dapat pelaksanaannya.

### **Multikulturalisme Sebuah Realita**

Istilah multikulturalisme pertama kali masyhur pada tahun 1950 di Kanada. Istilah ini diderivasi dari kata *multicultural* yang dipopulerkan surat kabar-surat kabar di Kanada, yang menggambarkan masyarakat Montreal sebagai masyarakat multikultural dan multilingual. Pada tahun 1970 di masa kepemimpinan Pierre Tudeau mencapai puncak kejayaan multikulturalisme dan berhasil menjadikan Toronto sebagai kota seribu etnis di mana Prancis sebagai bahasa resmi Kanada hanya diucapkan 1.4% warga Toronto, sisanya didominasi oleh China, Portugis, dan Italia. Toronto adalah kota paling multikultural di dunia dengan 200 grup etnis dan 140 bahasa disusul oleh Sydney, kota yang terletak di Australia bagian timur ini memiliki ragam bahasa sebanyak 250 bahasa, selanjutnya disusul oleh Singapura, Sao Paulo di Brasil, New York City di Amerika Serikat, dan Paris sebagai ibu kota Prancis (<http://www.travel.detik.com>).

Di Australia multikulturalisme diadopsi sebagai kebijakan sejak tahun 1970, menggantikan kebijakan sebelumnya berupa asimilasi dan integrasi. Lebih jauh pada tahun 2011 ini memasukkan unsur pemersatu (united) dalam kebijakan pengembangan

multikulturalisme yang pada saat itu dirilis oleh perdana menteri Julia Gillard yang difokuskan pada keadilan dan inklusi (<http://www.australiaplus.com>).

Di Indonesia wacana multikulturalisme baru dikenal sejak pasca reformasi dan mulai *booming* serta *fashionable* melalui terbitan dan seminar-seminar yang diselenggarakan oleh LSM (Truna, 2010:67). Rentang waktu yang begitu lama menyebabkan bangsa Indonesia harus berjuang keras memahami konteks dari kemunculan multikulturalisme sebagai sebuah konsep yang baru didengar namun perlu penyesuaian yang cepat sebab hal tersebut adalah hal biasa di mata dan telinga bangsa-bangsa lain yang lebih maju.

Krisis ekonomi, politik, dan agama yang terjadi pada akhir tahun 1997 mengakibatkan terjadinya krisis kultural di dalam kehidupan bangsa dan negara. Pada saat itu pendidikan dijadikan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan yang memonopoli sistem pendidikan untuk kelompok tertentu (Tilaar, 2004:138). Datangnya reformasi membuka segala peluang dan wacanan tentang kemajuan, termasuk datangnya konsep multikulturalisme didengungkan guna mengatasi krisis multi dimensi yang terjadi pada saat itu.

Menurut Saifuddin (2006:137) di Indonesia wacana multikulturalisme di Indonesia semakin mendapat tempat karena beberapa kondisi yaitu: *pertama*, desentralisasi yang mendorong ditingkatkannya batas-batas identitas kebudayaan di Indonesia, baik identitas etnik, agama maupun golongan. *Kedua*, desentralisasi politik masa kini yang sangat kurang memperhatikan dimensi kebudayaan. *Ketiga*, ketika batas-batas kebudayaan semakin nyata dan tajam, serta orientasi primordialisme mulai memicu konflik yang tajam antar etnik, agama, dan golongan dan ancaman ini dikhawatirkan mengancam integrasi bangsa, sehingga membuat para elit mencari solusinya.

Sesuatu yang baru kerap terasa indah dijadikan objek kajian bersama meskipun menurut bangsa lain hal itu bukan sesuatu yang layak untuk dikaji, namun besarnya antusias sebuah bangsa seperti Indonesia yang ingin terus bergerak maju menyebabkan perlunya kajian yang komprehensif tentang sebuah konsep semacam multikulturalisme. Usang menurut bangsa suatu bangsa tertentu belum tentu usang menurut bangsa lainnya dan kiranya masih ada peluang untuk menempatkan sebuah konsep pada tataran yang seharusnya dan lebih besar manfaatnya. Dengan demikian peluang untuk terus menata konsep tentang hal-hal yang dianggap usang tidaklah menjadi sebuah persoalan yang besar.

Secara umum, sebagaimana diungkapkan oleh Taylor dkk (1994:25) bahwa multikulturalisme merupakan suatu gagasan untuk mengatur keragaman dengan prinsip-prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri (*politic of recognition*). Gagasan ini menyangkut hubungan sosial atau relasi antara kelompok etnis. Dengan demikian diketahui bahwa lahirnya konsep multikulturalisme berlatar belakang kebutuhan akan pengakuan (*the need of recognition*) terhadap kemajemukan budaya, yang menjadi realitas sehari-hari banyak bangsa, termasuk Indonesia. Bangsa yang besar dengan ragam budaya yang ada seolah memunculkan sebuah kecemasan sehingga perlu mencari istilah yang tepat agar keragaman budaya tersebut menjadi sebuah kekuatan bukan sebuah kelemahan. Ragam budaya di Indonesia sendiri lahir dengan penuh kesadaran untuk membuat kemaslahatan bagi suatu suku tertentu bukan untuk menghancurkan dan melekat serta mengakar turun temurun hingga saat ini. Bukanlah suatu yang mustahil mengalami pergeseran budaya baik karena pemahaman yang mengikis atau karena ada kontaminasi budaya lain yang datang atau sekiranya pernah singgah.

Oleh karena itu, sejak semula multikulturalisme harus disadari dengan suatu ideologi yang kokoh dan tepat, serta menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan penghargaan atas kesetaraan semua manusia dan utamanya adalah nilai kemanusiaannya itu sendiri yang secara operasional mewujudkan melalui pranata-pranata sosialnya, yakni budaya sebagai pemandu kehidupan sekelompok manusia sehari-hari dan yang paling penting adalah kelompok manusia yang dikenal dengan istilah kelompok marjinal. Menurut Robert W. Hefner multikulturalisme ada dengan tujuan memasukkan kelompok-kelompok marjinal dan tidak diuntungkan, termasuk komunitas-komunitas religius ke dalam kehidupan publik (Truna, 2010:66). Artinya, kelompok marjinal harus turut serta disejajarkan dengan kelompok lain dalam segala hal. Dalam konteks ini, multikulturalisme adalah konsep yang melegitimasi keanekaragaman budaya. Multikulturalisme begitu kuat mengakar sebagai sebuah prinsip kesetaraan (*equality*) dan prinsip pengakuan (*recognition*). Tanpa adanya kedua konsep tersebut maka multikulturalisme dianggap tidak lengkap dan memiliki kekurangan yang dianggap mendasar.

Bangsa Indonesia yang dianggap manjemuk terangkum dalam fakta-fakta empiris berupa angka-angka yang dapat ditafsirkan, antara lain: hingga tahun 2016 tercatat sekitar 1.340 jenis suku yang tersebar dalam kepulauan yang terdiri atas 13.667 pulau,

seperti keompok-kelompok etnik Bugis, Makassar, Batak, Minang, Betawi, Sunda, Jawa, China, Bali, Ambon, Manado, dan Papua (Mulyadi, 2017:9). Kemudian bangsa Indonesia juga memeluk beragam agama dan kepercayaan yang menurut statistik: Islam 88,1%, Kristen dan Katolik 7,89%, Hindu 2,5%, Budha 1% dan yang lain 1%, dan riwayat kultural percampuran berbagai macam pengaruh budaya, mulai dari kultur Nusantara asli, Hindu, Islam, Kristen, dan juga Barat modern.

Deskripsi kondisi yang ada di Indonesia tersebut adalah sebuah realita yang harus disikapi dengan baik. Konsep apapun yang bertujuan untuk mendekatkan bangsa Indonesia ke arah kebaikan dan kesejahteraan serta munculnya rasa aman adalah sebuah usaha yang harus didukung. Konsep pluralisme yang datang lebih awal dapat disempurnakan dengan konsep multikulturalisme yang datang belakangan tanpa harus ada perselisihan di antara keduanya. Meskipun ada wacana yang memasukkan pluralisme ke dalam sub bagian dari multikulturalisme, namun kiranya lebih tepat jika keduanya dapat berjalan searah yang menempatkan posisi haluan sebagai dasar dalam mengembangkan kedua konsep tersebut.

Bangsa yang besar dengan realitas yang ada perlu dibenahi oleh bangsa itu sendiri. Tidak perlu lagi disebut ada kelompok masyarakat yang termarginalkan dalam arti hidup dalam ruang lingkung sendiri dan tidak berbaur layaknya manusia pada umumnya karena keterpaksaan. Tapi, perlu juga memberi ruang kepada mereka yang ingin tetap hidup dalam komunitas yang menurut mereka nyaman dan benar, baik secara adat maupun ideologi. Multikulturalisme juga harus menyentuh sisi tersebut sehingga ruang-ruang kebebasan berekspresi untuk kelompok masyarakat tertentu tetap ada dan terbuka sebagai sebuah kekayaan adat dan budaya bangsa yang besar.

### **Pengertian Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural**

Multikulturalisme diambil dari dua kata kunci yaitu multi yang berarti banyak (plural) dan kultural yang berarti budaya, multikulturalisme mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas keragaman kultural, yang berarti mencakup baik keberagaman tradisional seperti keberagaman suku, ras, ataupun agama, maupun keberagaman sub kultural yang terus bermunculan di setiap tahap sejarah kehidupan umat manusia. Pengertian secara bahasa tersebut diperkuat dengan konsep dasar multikulturalisme

yang berpijak pada kesetaraan (equality) dan pengakuan (recognition) sehingga menjadi satu kesatuan makna yang utuh.

Dalam pendefinisian multikulturalisme, Azra (2004) mendefinisikannya dengan landasan budaya yang terkait dengan pencapaian keadaban (civility) yang amat esensial bagi terwujudnya demokrasi yang berkeadaban dan keadaban yang demokratis. Pendefinisian tersebut kemudian bergeser pada pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik (Azra, 2007). Pandangan yang luas dari Azyumardi Azra tersebut menempatkan multikulturalisme pada wacana global yang sadar akan realitas bangsa Indonesia yang masih majemuk secara kultural.

Pandangan umum yang lebih menekankan kepada rasa saling hormat menghormati atau biasa disebut toleransi di Indonesia adalah pandangan Lawrence A. Blum (2001:16), seorang profesor filsafat di University of Massachusetts di Amherst yang mengatakan bahwa multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Adanya penanaman rasa ingin tahu pada budaya orang lain adalah upaya untuk menggali semacam kearifan lokal suatu budaya tertentu. Kelebihan suatu budaya yang pasti ada pada setiap budaya dapat diadopsi sebagai penyempurnaan hidup berbudaya di Indonesia.

Rasa menghormati budaya orang lain dalam ruang multikulturalisme dibuka oleh Jari dan Jary (1991), Watson (2000), dan Fay (2000) dalam (Suparlan, 2008:10) yang mencoba mengkalikan bahwa multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Pengagungan terhadap sebuah perbedaan menjadi kata kunci yang pantas didalami bahwa dalam perbedaan tersebut ada nilai atau pelajaran yang dapat memberikan manfaat besar bagi bangsa yang menganut konsep multikulturalisme, bahwa ada sesuatu yang sangat berharga sehingga perlu untuk dipelajari dari budaya orang atau kelompok lain.

M. Atho' Muzhar (Harahap, 2007) mengatakan bahwa multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu

negara, yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut. Pandangan Muzhar yang sangat nasionalis sekiranya dapat menjadi ujung analisa mengenai pemaknaan multikulturalisme di mana sebuah konsep perlu difungsikan sebagai sebuah sistem positif yang mengantarkan sebuah kelompok orang atau bangsa menuju kepada kebahagiaan bersama. Semangat kebangsaan adalah upaya yang patut ada dan terpatri dengan baik dalam menjalankan konsep multikulturalisme.

Secara umum dapat diketahui bahawa konsep multikulturalisme memiliki tiga ciri utama: *pertama*, kebutuhan terhadap pengakuan (*the need of recognition*), *kedua*, legitimasi keanekaragaman budaya atau pluralisme budaya, dan *ketiga*, ada semangat kebangsaan sebagai simbol tujuan bersama yang agung.

Berkenaan dengan pendidikan multikultural James Banks (Ibrahim, 2013:135) mendefinisikannya sebagai pendidikan untuk *people of color* sedangkan Andersen dan Cusher mengartikannya sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan.

Secara Konseptual; pendidikan multikultural menurut Gorsky (Ibrahim, 2013:145) mempunyai tujuan dan prinsip sebagai berikut: (a) setiap siswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan prestasi mereka; (b) siswa belajar bagaimana belajar dan berpikir secara kritis; (c) mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan, dengan menghadirkan pengalaman–pengalaman mereka dalam konteks belajar; (d) mengakomodasikan semua gaya belajar siswa; (e) mengapresiasi kontribusi dari kelompok– kelompok yang berbeda; (f) mengembangkan sikap positif terhadap kelompok-kelompok yang mempunyai latar belakang yang berbeda; (g) untuk menjadi warga negara yang baik di

sekolah maupun di masyarakat; (h) Belajar bagaimana menilai pengetahuan dari perspektif yang berbeda; (i) untuk mengembangkan identitas etnis, nasional dan global; (j) mengembangkan ketrampilan-ketrampilan mengambil keputusan dan analisis secara kritis sehingga siswa dapat membuat pilihan yang lebih baik dalam kehidupan sehari–hari.

Konsekuensi dari multikulturalisme adalah sikap menentang dan anti terhadap dominasi budaya tertentu, yang lebih dikenal dengan istilah monokulturalisme dan asimilasi yang merupakan norma-norma wajar dari sebuah negara dan bangsa sejak abad ke-19.

Konsep pendidikan multikultural secara normatif sebenarnya telah menjadi suatu keharusan logis di mana ruang pendidikan terbuka untuk semua kalangan lintas budaya.

Monokulturalisme menghendaki adanya kesatuan budaya secara normatif, sebab yang dituju oleh monokulturalisme adalah homogenitas, sekalipun homogenitas itu masih pada tahap harapan atau wacana dan belum terwujud (*pre-existing*). Pada perkembangan bangsa Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman agama, budaya, suku, dan bahasa tentu saja tidak membutuhkan lagi konsep monokultural eksklusif dan diskriminatif (Parekh, 2001:224-225).

Konsep asimilasi juga pernah didengungkan yaitu berupa timbulnya keinginan bersatu antara dua atau lebih kebudayaan yang berbeda dengan cara mengurangi perbedaan-perbedaan untuk mewujudkan menjadi satu kebudayaan baru. Pertentangan antara multikulturalisme dan monokulturalisme tampak nyata sekali dari asumsi dasar yang saling berseberangan, yang satu melegitimasi perbedaan sementara yang lain meminimalisir perbedaan.

Multikultural pada akhirnya menginginkan terciptanya masyarakat multikultural yang didefinisikan oleh Parekh (1997) dalam (Azra, 2007) sebagai suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihanannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan. Pendapat Parekh setidaknya menjadi jalan keluar yang tidak begitu besar memiliki persinggungan antara multikulturalisme dan monokulturalisme. Dalam pandangan Azra (2007:153), pembentukan masyarakat multikultural Indonesia yang sehat tidak bisa secara *taken for granted* atau *trial and error*. Sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, *integrated* dan berkesinambungan.

Indonesia yang secara ideologi yaitu Pancasila dengan yang dipakai berupa UUD 1945 maka harus memiliki indikasi karakter yang khusus jika ingin menjadi masyarakat multikultural, setidaknya menurut Cogan dan Derricot (1998:2-3) ada lima atribut yang mungkin dapat berbeda pada tiap negara termasuk Indonesia, hal itu disesuaikan dengan sistem politik negara masing-masing, yaitu: *a sense of identity, the enjoyment of certain rights, the fulfilment of corresponding obligation, a degree of interest and involvement in public affairs, dan an acceptance of basic societal values.*

Hakekatnya setiap kelompok masyarakat ingin terus hidup berdampingan satu dengan yang lain tanpa memiliki nilai lain yang menjauhkan kebersamaan mereka. Adanya istilah-istilah yang dibuat semata-mata hanya mencoba mencari solusi agar keinginan bersama untuk hidup berdampingan tetap tercipta dengan tanpa merugikan pihak-pihak tertentu. Jika suatu konsep dibangun tidak bersarkan tujuan bersama untuk mencapai kebahagiaan maka konsep tersebut dapat dikatakan cacat dari awal, namun jika pada akhirnya suatu konsep yang bertujuan baik dan mulia tidak mencapai hasil sesuai harapan, maka konsep tersebut tetap berada pada posisi yang baik sedangkan aplikasinya yang perlu untuk terus diupdate sehingga melahirkan nilai-nilai yang baik dan mulia.

### **Model Multikulturalisme**

Dalam ilmu sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh Ricardo L. Garcia (1982:37-42), ada sebuah teori yang sangat populer yang disebut dengan teori masyarakat majemuk (communal theory). Ketiga teori tersebut adalah:

*Pertama*, Melting Pot I (Anglo Conformity). Teori ini berpandangan bahwa masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, budaya dan yang lainnya harus disatukan dengan satu wadah yang paling dominan. Sebuah teori yang memandang adanya sebuah hirarkis dalam masyarakat yang baru-baru ini di Indonesia sangat populer, yaitu kelompok mayoritas dan minoritas. Teori ini dinilai tidak demokratis karena yang paling dominanlah yang berhak berekspresi dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Di Indonesia agama Islam adalah agama mayoritas, maka yang selain Islam harus meleburkan diri dalam Islam, dari sisi etnis jika Jawa adalah yang paling dominan maka selain Jawa harus melebur menjadi etnis Jawa.

*Kedua*, Melting Pot II (Ethnic Syntesis). Teori ini dipopulerkan oleh Israel Zangwill, dalam teori ini dibentuk sebuah wadah baru yang menjadi wadah bersama dalam mengekspresikan identitas sehingga identitas lamanya akan menghilang karena telah melebur menjadi identitas baru. salah satu contohnya di Indonesia adalah istilah Islam Jawa di Kraton yaitu perpaduan antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kejawen. Teori ini juga dinilai tidak demokratis karena hanya mampu menampung sebagian unsur budaya asli individu dalam masyarakat dan membuang sebagian unsur budaya lain.

*Ketiga*, Cultural Pluralism (Mosaic Analogy). Sebuah teori yang dikemukakan oleh Berkson ini berpandangan bahwa masyarakat yang terdiri dari individu yang memiliki

ragam etnis, bahasa, agama dan sebagainya berhak untuk mengekspresikan identitas dan berhak mengembangkannya. Masyarakat yang menganut teori ini terdiri dari individu-individu yang sangat pluralistik, sehingga masing-masing identitas individu dan kelompok dapat hidup dan membentuk mosaik yang indah.

Pandangan Garcia inilah yang akhirnya mewarnai bentuk atau model multikulturalisme yang datang selanjutnya. Adanya konsep masyarakat majemuk yang ditandai dengan berkembangnya pluralisme menumbuhkembangkan model-model konsep yang sangat beragam. Untuk dapat menjadikan sebuah konsep teridentifikasi nilai guna dan daya gunanya para pakar mencoba mengurai konsep multikulturalisme ke dalam beberapa model, di antaranya adalah Parekh (1997) yang membedakan lima model multikulturalisme:

*Pertama*, Multikulturalisme isolasionis, yaitu masyarakat yang berbagai kelompok kulturalnya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi minimal satu sama lain. keterlibatan mereka dalam interaksi adalah ciri budaya yang otonom dimana satu sama lain berbaur dan mencoba mengambil manfaat dari setiap interaksi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari

*Kedua*, Multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat ini merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Begitupun sebaliknya, kaum minoritas tidak menantang kultur dominan. Multikulturalisme ini diterapkan di beberapa negara Eropa. Di Indonesia sendiri tentunya dapat dilihat dari perjalanan panjang agama Islam dengan ajaran budaya yang dianut pemeluknya, sangat tepat jika menerapkan multikulturalisme akomodatif di mana undang-undang seharusnya dirumuskan berdasarkan ketentuan Islam dengan tetap memberi kebebasan kepada penganut agama lain untuk mempertahankan ajaran agama mereka.

*Ketiga*, Multikulturalisme otonomis, yaitu masyarakat plural yang kelompok-kelompok kultural utamanya berusaha mewujudkan kesetaraan (equality) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Perhatian pokok kultural ini adalah untuk mempertahankan cara hidup

mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan; mereka menantang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat yang semua kelompoknya bisa eksis sebagai mitra sejajar. Kaum etnis China khususnya di Indonesia dewasa ini menuju multikulturalisme otonomis. Mereka berusaha mencapai kesejajaran dengan kelompok dominan khususnya di ranah politik.

*Keempat*, Multikulturalisme kritikal/interaktif, yakni masyarakat plural yang kelompok-kelompok kulturalnya tidak terlalu terfokus (concerned) dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif khas mereka. Kelompok ini dinilai sedikit lebih maju pandangannya di mana rasa dominan sudah mulai terkikis dalam diri setiap kelompok dan mencoba menggali wacana bersama dalam menghadapi musuh bersama. Seandainya bangsa Indonesia sudah mampu untuk menyatakan bahwa teroris itu adalah musuh bersama dan tidak lagi mengindikasikan suatu golongan tertentu ke dalam aksi tersebut maka bangsa Indonesia sudah menempati posisi multikulturalisme kritikal. Tapi, bila masih ada kelompok-kelompok tertentu yang masih beranggapan bahwa teroris adalah bagian dari kelompok tertentu dalam sebuah perspektif, maka hal tersebut belum dapat dikatakan sebuah kelompok multikulturalisme kritikal.

*Kelima*, Multikulturalisme kosmopolitan, yaitu masyarakat plural yang berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat tempat setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu, sebaliknya secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Kelompok multikulturalisme kosmopolitan ini pernah dijalani umat Islam ketika terjadi peristiwa hijrah dimana kaum anshar dan muhajirin yang satu sama lain memiliki kultur yang berbeda dipersatukan secara plural dimana mereka menyatu dalam kebahagiaan dengan tetap bebas berekspresi mengembangkan budaya masing-masing tanpa adanya rasa menjadi lebih dominan satu dengan yang lainnya.

Heywood (2007:313) membagi multikulturalisme ke dalam dua bagian yaitu multikulturalisme deskriptif dan multikulturalisme normatif. Multikultural deskriptif biasanya ada dalam kelompok masyarakat awam sedangkan multikultural normatif yaitu suatu sokongan positif, bahkan perayaan atas keragaman komunal, yang secara

tipikal didasarkan atas hak dari kelompok-kelompok yang berbeda untuk dihargai dan diakui, atau atas keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh lewat tatanan masyarakat yang lebih luas keragaman moral dan kulturalnya.

Menurut Parekh (2001), ada tiga komponen multikulturalisme, yakni kebudayaan, pluralitas kebudayaan, dan cara tertentu untuk merespons pluralitas itu. Multikulturalisme bukanlah doktrin politik pragmatik, melainkan cara pandang kehidupan manusia. Karena hampir semua negara di dunia tersusun dari aneka ragam kebudayaan, artinya perbedaan menjadi dasarnya dan gerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi semakin intensif, maka multikulturalisme itu harus diterjemahkan ke dalam kebijakan multikultural sebagai politik pengelolaan perbedaan kebudayaan warga negara.

Parsudi Suparlan menuliskan, setidaknya ada tiga model kebijakan multikultural negara untuk menghadapi realitas pluralitas kebudayaan, yaitu:

*Pertama*, model yang mengedepankan nasionalitas. Nasionalitas adalah sosok baru yang dibangun bersama tanpa memperhatikan aneka ragam suku bangsa, agama, dan bahasa, dan nasionalitas bekerja sebagai perekat integrasi. Dalam kebijakan ini setiap orang bukan kolektif berhak untuk dilindungi negara sebagai warga negara sampai muncul rasa aman pada setiap warga dan pada akhirnya bermuara pada rasa nasionalisme sebagai timbal balik dari rasa aman yang diberikan oleh negara.

Di sisi lain, model ini dipandang sebagai penghancur akar kebudayaan etnik yang menjadi dasar pembentukan negara dan menjadikannya sebagai masa lampau saja. Pandangan nasionalisme secara tidak langsung mengharuskan setiap warga meninggalkan kepentingan etnis, agama, ras untuk kepentingan nasional. Model kebijakan multikultural ini dikhawatirkan terjerumus ke dalam kekuasaan otoritarian karena kekuasaan untuk menentukan unsur-unsur integrasi nasional berada di tangan suatu kelompok elite tertentu.

*Kedua*, model nasionalitas-etnik yang berdasarkan kesadaran kolektif etnik yang kuat yang landasannya adalah hubungan darah dan kekerabatan dengan para pendiri nasional (founders). Selain itu, kesatuan bahasa juga merupakan ciri nasional-etnik ini. Model ini dianggap sebagai model tertutup karena orang luar yang tidak memiliki sangkut paut hubungan darah dengan etnis pendiri nasional akan tersingkir dan diperlakukan sebagai orang asing.

Model kedua ini jauh lebih berbahaya baik demi keutuhan dan kepentingan nasional sendiri, apalagi kepentingan golongan atau kelompok tertentu yang memang harus tunduk dan patuh pada golongan yang memegang kendali kekuasaan. Apapun bisa dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan sampai pada tahap kehilangan hak serta dikucilkan di tempat kelahirannya sendiri sebagai ibu pertiwi.

*Ketiga*, model multikultural-etnik yang mengakui eksistensi dan hak-hak warga etnik secara kolektif. Dalam model ini, keanekaragaman menjadi realitas yang harus diakui dan diakomodasi negara, dan identitas dan asal-usul warga negara diperhatikan. Isu-isu yang muncul karena kebijakan ini tidak hanya keanekaragaman kolektif dan etnik, tetapi juga isu mayoritas-minoritas, dominan tidak dominan.

Model ketiga ini memiliki persoalan yang lebih kompleks lagi karena ternyata mayoritas tidak selalu berarti dominan, karena berbagai kasus menunjukkan bahwa minoritas justru dominan dalam ekonomi. Jika kekuasaan negara lemah karena prioritas kekuasaan dilimpahkan ke aneka ragam kolektif sebagai konsekuensi pengakuan negara, negara mungkin diramaikan konflik-konflik internal berkepanjangan yang pada gilirannya akan melemahkan negara itu sendiri (Suparlan, 2001).

Pemikiran Suparlan yang lebih mengekspresikan keindonesiaan perlu menjadi renungan bersama dimana suatu budaya dapat berjalan beriringan bersama dengan ketiga model yang diadopsi bangsa yang majemuk seperti Indonesia. Dari pemaparan Suparlan tentang ketiga model tersebut menunjukkan belum adanya model yang paling ideal yang diharapkan oleh bangsa Indonesia dalam membentuk sebuah konsep multikulturalisme yang satu haluan dan tidak memberikan implikasi negatif kepada bagian manapun atau dengan sebutan lain adalah sempurna. Tapi, kata nasionalisme sebagai kata kunci bangsa Indonesia yang selalu didengungkan oleh sebagian elit politik sementara ini dianggap ampuh dalam meredam segala macam konflik yang datang kiranya juga tidak dapat dinafikan.

### **Kritik Terhadap Multikulturalisme**

Multikulturalisme mengandung persoalan yang cukup mendasar tentang konsep kesetaraan budaya itu sendiri. Beberapa kritikus multikulturalisme telah bicara tentang kelemahan multikulturalisme. Kritik terhadap multikulturalisme biasanya berangkat dari dua titik tolak. Pertama, kesadaran tentang ketegangan filosofis antara kesatuan dan perbedaan (one and many). (David Miller 1995) menulis bahwa multikulturalisme radikal menekankan perbedaan-perbedaan antar kelompok budaya dengan mengorbankan berbagai persamaan yang mereka miliki dan dengan demikian multikulturalisme akan melemahkan ikatan-ikatan solidaritas yang berfungsi mendorong para warga negara untuk mendukung kebijakan-kebijakan redistributif dari negara kesejahteraan.

Ungkapan Miller yang menyertakan kata radikal yang di Indonesia sendiri berkonotasi negatif karena dinilai memiliki unsur kekerasan seperti yang marak didengungkan yaitu gerakan radikal tentunya sudah dapat dipahami bahwa ungkapan tersebut negatif. Multikulturalisme yang dimaksud adalah mengangkat perbedaan dan mengembangkannya menjadi sebuah kelebihan bersama untuk tujuan kebaikan bersama sekiranya itu yang diinginkan oleh penggagas multikulturalisme yaitu bangsa Kanada. Tapi, jika unjuk perbedaan tersebut untuk menghancurkan budaya lain yang berbeda, kiranya itu buka semangat multikulturalisme.

Anne Phillips (2007:13) menegaskan bahwa multikulturalisme radikal akan menghancurkan kohesi sosial, melemahkan identitas nasional, mengosongkan sebagian besar dari isi konsep. kewarganegaraan. Jika telah sampai pada titik yang berbahaya, multikulturalisme radikal akan membangkitkan semangat untuk memisahkan diri atau separatisme dalam psike kelompok kelompok kultural. Gambaran Papua, Aceh, dan Timor Leste di Indonesia adalah gambaran multikulturalisme radikal, di mana perbedaan diangkat untuk menghancurkan budaya lain yang berbeda. Semangat tersebut tidak dibenarkan adanya.

Peneliti feminis Susan Moller Okin, misalnya, menilai bahwa agenda multikulturalisme tidak dapat berbuat banyak, atau justru makin melemahkan posisi perempuan dalam tatanan masyarakat lokalnya. Praktik-praktik seperti poligami, penyunatan alat kelamin perempuan, pernikahan paksa terhadap anak-anak perempuan termasuk anak-anak perempuan berusia dini, dan lain sebagainya berupa praktik yang bias gender, justru dilegitimasi oleh multikulturalisme yang memberikan hak otonom bagi setiap kelompok kultural untuk melanggengkan tatanan sosial masing-masing. Jika tatanan sosial dari

kelompok kultural tersebut didasarkan atas sistem patriarki, kata Okin (1998:61-84), posisi perempuan dalam masyarakat itu sangat lemah.

Pendapat Okin kiranya dapat dibenarkan bahwa jika multikulturalisme dalam praktiknya dipahami sebagai sebuah ruang budaya yang diberi kebebasan sebeb- bebasnya dalam mengekspresikan dan mengembangkan suatu budaya tertentu yang tidak baik dalam pandangan suatu ajaran tertentu maka akan merugikan nilai kemanusiaan. Jika menikahkan anak gadis menjadi ketentuan orang tua tanpa ada nilai kebajikan dapat berujung pada penindasan terhadap hak perempuan untuk memilih pasangan yang diinginkan, jika masih dibiarkan budaya poliandri, jika masih berkembang budaya sayembara dsb maka suatu bangsa khususnya Indonesia akan kembali kepada kegelapan budaya yaitu budaya jahiliah. Multikulturalisme bukanlah solusi yang tepat jika kekhawatiran Okin ada pada kenyataannya dan menjadi satu titik kelemahan yang patut untuk dikaji dan dicari solusinya.

Anne Phillips (2007:3) menganalisis situasi ini sebagai benturan antar prinsip kesetaraan. Terjadi konflik antara dua klaim kesetaraan. Multikulturalisme ingin menghapuskan ketidaksetaraan yang dialami oleh kelompok-kelompok kultural minoritas, sementara

feminisme ingin menghapuskan ketidaksetaraan yang dialami oleh kaum perempuan. Kedua proyek ini, multikulturalisme dan feminisme, sebetulnya berangkat dari komitmen yang sama terhadap prinsip kesetaraan dan keduanya berhadap-hadapan sebagai dua aspek yang harus diseimbangkan. Karena keduanya sama-sama mengurus isu ketidaksetaraan yang nyata, sangat tidak tepat untuk memutuskan yang satu lebih fundamental daripada yang lain.

Ada risiko konseptual dalam multikulturalisme bahwa perbedaan budaya akan terlalu disakralkan sehingga kebenaran universal tentang praktik sosial politik yang ideal tidak lagi dicari dan kritik normatif atas praktik budaya tertentu ditabukan. Para feminis sudah lama mengkritik multikulturalisme sebagai ideologi yang merugikan perempuan karena melegitimasi sistem sosial patriarkis dalam budaya-budaya lokal. Sekalipun prinsip kesetaraan (*principle of equality*) bersifat mendasar bagi demokrasi dan kehidupan kebangsaan modern, namun kesetaraan bukanlah satu-satunya prinsip yang berlaku. Demokrasi juga mengandung penghargaan terhadap hak asasi manusia dan memberikan ruang luas bagi individu dalam kelompok untuk mengekspresikan diri

secara unik. Isu ketegangan antara penghargaan terhadap keberbedaan dan hak untuk menjadi berbeda dengan konsep universal tentang martabat individu sesungguhnya inilah perlu diteliti lebih lanjut agar ditemukan solusi yang tepat.

Sampai di titik ini, dapat dilihat proyek multikulturalisme dengan lebih menyeluruh, bukan semata-mata sebagai jargon politik untuk mencitrakan ideologi atau organisasi yang pro kemanusiaan, melainkan sebagai sebuah konsep filosofis dengan asumsi-asumsi yang ternyata problematis. Salah satu ironi dari proyek multikultural, lanjut Phillips (2007:25) adalah bahwa atas nama kesetaraan dan respek mutual antar elemen masyarakat, ia juga mendorong setiap orang untuk memandang kelompok-kelompok dan tatanan-tatanan budaya secara sistematis lebih berbeda daripada kenyataan sesungguhnya dan dalam proses tersebut, multikulturalisme berkontribusi menciptakan stereotipisasi wujud-wujud kultural yang ada.

Phillips memandang bahwa multikulturalisme setidaknya perlu dikaji lebih komprehensif sehingga tidak berbenturan dengan konsep lain yang juga memiliki prinsip-prinsip dasar yang tidak jauh berbeda seperti feminisme. Setiap konsep yang dikemukakan tentu tidak dapat menjangkau segala aspek yang sesuai dengan harapan, kiranya kritik terhadap multikulturalisme sendiri menjadi sebuah ruang diskusi mencari solusi dan adanya beberapa masalah dalam konsep multikulturalisme dapat dibenahi dengan pendekatan lain yang memiliki satu haluan dasar yang berprinsip pada kebahagiaan bersama dengan tidak meninggalkan nilai-nilai luhur suatu ajaran kebaikan yang telah dianut oleh suatu kebudayaan tertentu.

Ruang pendidikan yang luas tentu menaruh perhatian yang positif terhadap berkembangnya konsep multikulturalisme di dunia pendidikan. Ruang yang selama ini sudah benar-benar terbuka dalam tataran konsep namun pada aplikasinya masih terasa berat dan jelas terlihat adanya perbedaan kasta dan kelas sosial. Setiap institusi pendidikan seolah mempunyai pasar tertentu yang terkesan menentang konsep multikulturalisme. Orang-orang kayalah penikmat sejati pendidikan berkelas dan terbaik sedangkan yang lain terkesan terpenjara dalam pendidikan yang serba kekurangan dalam berbagai aspek.

Jika suatu institusi pendidikan menginginkan adanya konsep baru yang utuh, maka pendidikan multikultural adalah jawabannya. Maka setidaknya ada beberapa syarat atau kondisi yang diajukan. Ibrahim (2013:139) mengungkapkan setidaknya ada tiga

kata kunci yang menandai keberadaan pendidikan multikultural dalam suatu institusi pendidikan yaitu; *pertama*, proses pengembangan sikap dan tata laku, *kedua*, menghargai perbedaan dan keragaman budaya. *Ketiga*, penghargaan terhadap budaya lain. Kata kunci tersebut akan menjadi landasan dalam merumuskan konsep Islam dalam memahami pendidikan multikultural.

### **Kesimpulan**

Secara umum dapat diketahui bahwa konsep multikulturalisme memiliki tiga ciri utama: *pertama*, kebutuhan terhadap pengakuan (the need of recognition), *kedua*, legitimasi keanekaragaman budaya atau pluralisme budaya, dan *ketiga*, ada semangat kebangsaan sebagai simbol tujuan bersama yang agung yang dalam sebagian pendapat disebut dengan nasionalisme meskipun ada sedikit perdebatan dalam praktik nasionalisme itu sendiri.

Multikulturalisme belumlah menjadi sebuah konsep yang ideal untuk menentukan haluan bersama yaitu hidup bahagia dengan penuh nilai-nilai keluruhan budi karena di dalamnya ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Namun, usaha untuk pembenahan yang kecil porsinya kiranya menjadi spirit bahwa multikulturalisme dapat menjadi satu alternatif untuk menjadi alat penguat bangsa dalam konsep kesatuan dan persatuan bangsa.

Masih adanya bias gender dalam konsep multikulturalisme adalah sisi lain dalam mengungkap fenomena perkembangan sebuah konsep yang lahir dalam komunitas majemuk seperti bangsa Indonesia. Bias dapat diatasi dengan mengungkap kelurusan suatu budaya dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kesusilaan di mana suatu budaya tidak dapat mengekspresikan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

Multikulturalisme pada akhirnya tetap menjadi sebuah alat yang dapat dijadikan landasan untuk melahirkan sesuatu yang baik di tengah-tengah masyarakat majemuk dan kompleks seperti bangsa Indonesia. Ruang lingkup yang ada dalam konsep multikulturalisme bagaimanapun dapat dijadikan ruang terbuka untuk bersama-sama memikirkan kebaikan bersama di atas kepentingan golongan apapun.

Konsep pendidikan multikultural dengan beberapa kata kunci yang ada masih sangat sederhana, sehingga belum mewakili konsep multikulturalisme secara luas, namun

standard yang diberikan sekedar untuk menjembatani institusi yang sudah siap memberikan pelayanan terbaik untuk bangsa Indonesia tanpa melihat perbedaan dan institusi yang terus mempertahankan status masa lalunya di dunia pendidikan. Pendidikan multikultural adalah pandangan utuh terhadap hakekat manusia yang kompleks tanpa membedakan dari sudut atau sisi manapun, utamanya dalam perbedaan budaya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Azra, Azyumardi (2004) *Demokrasi Multikultural*. Harian Republika 12 Agustus
- Azra, Azyumardi (2007) *Identitas dan Krisis Budaya. Membangun Multikulturalisme Indonesia*
- Blum, Lawrence A (2001) *Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar Ras, Tiga Nilai yang Sangat Mendidik bagi Sebuah Masyarakat Multikultural dalam* L. May, S. Collins Chobanian, dan K. Wong, Editor, *Etika Terapan I. Sebuah Pendekatan Multikultural*, Yogyakarta. Tiara Wacana
- Garcia, Ricardo L (1982) *Teaching in a Pluralistic Society*. Concepts, Models, Strategies, New York: Harper dan Row Publisher
- Heywood, Andrew (2007) *Political Ideologies*, Palgrave. McMillan
- Ibrahim, Rustam (2013) *Pendidikan Multikultural*, Addin Vol.7 No.1
- Februari Miller, David, (1995) *On Nationality*, Oxford. Oxford University Press.
- Mulyadi, Mohammad (2017) *Membangun NKRI dengan Multikulturalisme. Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, Vol. IX. 10/II/Pulsit/Mei
- Okin, Susan Moller (1998). *Feminism and Multiculturalism. Some Tensions. Ethics* 108
- Okin, Susan Moller (1999) *Is Multiculturalism Bad for Women?* Editor, Joshua Parekh, Bikhu, (2001) *Rethinking Multiculturalism*. Harvard.
- Phillips, Anne (2007) *Multiculturalism without Culture*, Princeton: Princeton University Press
- Saifuddin, Achmad Fedyani (2006) *Reposisi Pandangan mengenai Pancasila. dari Pluralisme ke Multikulturalisme*. Dalam Retorasi Pancasila. Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas, Bogor. Brighten Press
- Suparlan, Parsudi (2002) *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*. Keynote Address Simposium III Internasional Jurnal Antropologi Indonesia, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16–19 Juli.
- Suparlan, Parsudi (2005) *Sukubangsa dan Hubungan antar Sukubangsa*. Jakarta. YPKIK
- Suparlan, Parsudi (2008) *Dari Masyarakat Majemuk Menuju Masyarakat Multikultural*. Jakarta. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK)
- Syamsudin, Din (2016) *pada acara World Culture Fourm (WCF)* di Nusa Dua Bali tanggal 12 Oktober
- Taylor, C. et all (1994) *Multiculturalism, Examining the Politic of Recognition*. United Kongdom. Princeton University Press
- Tilaar, H.A.R (2004) *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta. Grasindo
- Truna, Dody S, (2010) *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme*. Jakarta. Kemenag RI

### Internet

- <http://www.travel.detik.com> dengan tema *Toronto kota seribu etnis di Kanada*
- <http://www.m.liputan6.com> dengan tema *kota paling multikultural*
- <http://www.australiaplus.com> dengan tema *multikultur berhasil jika semua warganya mendukung*